

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian dan Asas Perjanjian

Menurut Pasal 1313 KUHPdata mengatur bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pengertian ini sebenarnya tidak begitu lengkap, tetapi dengan pengertian ini, sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat satu pihak yang mengikatkan diri kepada pihak lain. Pengertian ini sebenarnya seharusnya menerangkan juga tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri tentang suatu hal.¹³

Menurut Subekti suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana orang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.¹⁴

¹³Ahmadi Miru Dan Sakka Pati, 2008, *Hukum Perikatan* (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 Bw), Rajagarfindo Perdasa, Jakarta, Hlm. 63.

¹⁴ Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Cetakan 20, Intermasa, Jakarta, Hlm. 1.

Dalam perjanjian dikenal beberapa asas penting yang merupakan dasar kehendak pihak-pihak dalam mencapai tujuan. Beberapa asas tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:¹⁵

a. Asas kebebasan berkontrak.

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi:¹⁶ “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas kebebasan berkontrak adalah salah satu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- 1) Membuat atau tidak membuat perjanjian,
- 2) Mengadakan perjanjian dengan siapapun,
- 3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, dan
- 4) Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

b. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) BW.¹⁷ Dalam pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan

¹⁵Salim Hs, 2014, *Hukum Kontrak (Teori & Teknik Penyusunan Kontrak)*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm.9

¹⁶ Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara (BW)

¹⁷ Pasal 1320 Ayat (1) KUHPerdara (BW)

persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

c. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas *pacta sunt servanda* atau disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.¹⁸

d. Asas Itikad Baik (*Goede Trouw*)

Asas itikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang berbunyi :¹⁹ “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Asas itikad merupakan asas bahwa para pihak, yaitu kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.

Asas itikad baik dibagi menjadi dua macam yaitu itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Pada itikad baik nisbi, orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad baik mutlak, penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang

¹⁸ Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Cetakan 20, Jakarta: Intermasa, Hlm.10

¹⁹ Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdata (BW)

objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.²⁰

e. Asas Kepribadian (Personalitas)

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 KUHPerdara. Pasal 1315 KUHPerdara berbunyi: “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.” Inti ketentuan ini bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Pasal 1340 KUHPerdara berbunyi: “Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya”. Ini berarti bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Namun ketentuan itu ada pengecualiannya, sebagaimana yang diintrodusir dalam Pasal 1317 KUHPerdara, yang berbunyi: “Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu”.²¹

²⁰ *Ibid.* Hlm 12

²¹ *Ibid.* Hlm 12

2. Syarat Sah dan Unsur Perjanjian Menurut Pasal 1320 KUHPdata

Menurut Pasal 1320 KUHPdata, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: Kesepakatan, Kecakapan, Mengenai suatu hal tertentu, Suatu sebab yang halal.

Berikut ini penjelasan dari syarat sahnya suatu perjanjian:

a. Kesepakatan

Kesepakatan diperlukan dalam mengadakan perjanjian, ini berarti bahwa kedua belah pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak, artinya masing-masing pihak tidak mendapat suatu tekanan yang mengakibatkan adanya cacat dalam melakukan kehendaknya.²²

b. Kecakapan

Seorang oleh hukum dianggap tidak cakap untuk melakukan kontrak jika orang tersebut belum berumur 21 tahun, kecuali ia telah kawin sebelum cukup 21 tahun. Sebaliknya setiap orang yang berumur 21 tahun keatas, oleh hukum dianggap cakap, kecuali karena suatu hal dia ditaruh di bawah pengampuan seperti gelap mata, dungu, sakit ingatan, atau pemboros.²³

c. Mengenai Suatu Hal Tertentu

Syarat ketiga ditentukan bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan

²² I Ketut Oka Setiawan, 2016, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm.61

²³ Ahmadi Miru, 2011, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, Hlm 23-24

kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Hal tertentu ini dalam kontrak disebut prestasi yang dapat berwujud barang, keahlian atau tenaga, dan tidak berbuat sesuatu.²⁴

d. Suatu Sebab yang Halal

Syarat keempat untuk suatu perjanjian yang sah adanya suatu sebab yang halal. Dengan sebab (bahasa Belanda *oorzaak*, Bahasa Latin *causa*) ini dimaksudkan tiada lain dari pada isi perjanjian. Dorongan jiwa untuk membuat suatu perjanjian pada dasarnya tidak diperdulikan oleh undang-undang.²⁵

Hukum tidak memperhatikan apa yang ada dalam benak ataupun hati seseorang. Yang diperhatikan oleh hukum adalah apa yang tertulis, yang pada pokoknya menjadi perikatan yang harus atau wajib dilaksanakan oleh debitor dalam perjanjian tersebut.²⁶

Undang-undang hanya melihat pada apa yang tercantum dalam perjanjian yang merupakan prestasi yang harus dilakukan oleh para pihak, yang merupakan prestasi pokok, yang merupakan unsur *esensialia* atau yang terkait erat dengan unsur *esensialia* dalam perjanjian tersebut, yang tanpa adanya unsur *esensialia* tersebut, tidak mungkin perjanjian tersebut akan dibuat oleh para pihak.²⁷

²⁴ Ahmadi Miru, *Op.Cit*, Hlm.30.

²⁵ Subekti, *Op. Cit.*, Hlm. 19.

²⁶ Kartini Muljadi Dan Gunawan Widjaja, 2010, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta: Raja Grafindo, Hlm.161

²⁷ *Ibid*, Hlm.163

Dalam perkembangan doktrin ilmu hukum, dalam suatu kontrak dikenal adanya tiga unsur dalam perjanjian, yaitu:²⁸

a) Unsur Esensialia

Unsur esensialia merupakan unsur yang harus ada dalam suatu kontrak karena tanpa adanya kesepakatan tentang unsur esensialia ini maka tidak ada kontrak. Sebagai contoh, dalam kontrak jual beli harus ada kesepakatan mengenai barang dan harga karena tanpa kesepakatan mengenai barang dan harga dalam kontrak jual beli, kontrak tersebut batal demi hukum karena tidak ada hal tertentu yang diperjanjikan.

b) Unsur Naturalia

Unsur naturalia merupakan unsur yang telah diatur dalam undang-undang sehingga tidak diatur oleh para pihak dalam kontrak, undang-undang yang mengaturnya. Dengan demikian, unsur naturalia ini merupakan unsur yang dianggap selalu ada dalam kontrak. Sebagai contoh, jika dalam kontrak tidak diperjanjikan tentang cacat tersembunyi, secara otomatis berlaku ketentuan dalam BW bahwa penjual yang harus menanggung cacat tersembunyi.

c) Unsur Aksidentalialia

Unsur aksidentalialia merupakan unsur yang nantinya ada atau mengikat para pihak jika para pihak memperjanjikannya. Sebagai contoh, dalam kontrak jual beli dengan angsuran diperjanjikan

²⁸ Ahmadi Miru, *Op.Cit.*, Hlm.31

bahwa apabila pihak debitur lalai membayar utangnya, dikenakan denda 2% perbulan keterlambatan, dan apabila debitur lalai membayar selama tiga bulan berturut-turut, barang yang sudah dibeli dapat ditarik kembali oleh kreditor tanpa melalui pengadilan. Demikian pula klausul-klausul lainnya yang sering ditentukan dalam suatu kontrak, yang bukan merupakan unsur esensial dalam kontrak tersebut.

B. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi

Mengenai perumusan wanprestasi, sekalipun ada perbedaan dalam cara merumuskan, pada umumnya para sarjana merumuskannya sebagai berikut:²⁹

Wanprestasi adalah suatu peristiwa atau keadaan dimana debitur tidak telah memnuhi kewajiban prestasi perikatannya dengan baik, dan debitur punya unsur salah atasnya. Perlu disimpulkan bahwa wanprestasi berangkat dari prinsip yang kewajibannya harus atau wajib dipenuhi debitur dengan baik.

Marharis Abdulhay menyatakan bahwa wanprestasi adalah apabila pihak-pihak yang seharusnya melakukan prestasi tidak memenuhi prestasinya.

Wanprestasi berarti tidak melakukan apa yang menjadi unsur prestasi, yakni :³⁰

- a. Berbuat sesuatu;
- b. Tidak berbuat sesuatu; dan
- c. Menyerahkan sesuatu

²⁹ J.Satrio. 2014. *Wanprestasi Menurut Kuhperdata, Doktrin Dan Yurisprudensi*. Bandung: Pt.Citra Aditya Bakti. Hlm 3

³⁰ Ibid

Dalam *restatement of the law of contract* (Amerika serikat), wanprestasi atau *breach of contracts* dibedakan menjadi dua macam, yaitu:³¹

- a. *Total breachts* artinya pelaksanaan kontrak tidak mungkin dilaksanakan;
- b. *Partial breachts* artinya pelaksanaan perjanjian masih mungkin untuk dilaksanakan.

Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur atau Juru Sita. Somasi minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur atau Juru Sita. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Dan pengadilan yang berhak memutuskan, apakah debitur wanprestasi atau tidak.³²

Hubungan yang terjadi antara Perusahaan Jasa Pengiriman Barang (Ekspeditor) dan konsumen atau pengguna jasa pengiriman barang merupakan hubungan “Kontraktual” yang lahir akibat perjanjian (kontrak) yang mereka buat, maka adanya hubungan antara konsumen dan Perusahaan Jasa Pengiriman Barang (Ekspeditor) itu disebut hubungan Kontraktual. Hubungan inilah yang dapat menyebabkan konsumen sebagai pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ganti rugi terhadap Perusahaan Jasa Pengiriman Barang (Ekspeditor). Jika tidak ada hubungan kontraktual tersebut maka dengan mudah pihak Perusahaan Jasa Pengiriman Barang (Ekspeditor) mengajukan bantahan bahwa

³¹ Ibid, Hlm 8

³² Yan Risa Alviano. 2017. *Skripsi Tentang Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil*. Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

pihak yang bertanggungjawab hanyalah pihak yang terikat dalam suatu perjanjian (privity of contract).³³

Perjanjian yang dibuat adalah perjanjian Ekspedisi sebagaimana dalam Pasal 86 KUHD bahwa Perjanjian ekspedisi merupakan perjanjian timbal balik antara ekspediteur yang mengikatkan diri untuk mencari pengangkut bagi pihak pengirim, dengan pihak pengirim yang mengikatkan diri untuk membayar kepada Perusahaan Jasa Pengiriman Barang (Ekspediteur). Perjanjian ekspedisi memiliki sifat hukum “pelayanan berkala” (Pasal 1601 KUH Perdata) dan “pemberian kuasa” (Pasal 1792 KUHPerdata).

Pasal 1601 KUHPerdata menyebutkan: “Selain perjanjian-perjanjian untuk melakukan jasa, yang diatur oleh ketentuan-ketentuan yang khusus dan syarat-syarat yang diperjanjikan, dan jika itu tidak, maka ada dua macam perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk melakukan pekerjaan bagi pihak yang lainnya dengan menerima upah; perjanjian perburuhan dan pemborongan” Pernyataan diatas menyatakan bahwa sifat hukum “pelayanan berkala” adas dalam perjanjian ekspedisi karena hubungan ekspediteur dan pengirim tidak tetap, yakni ketika pengirim membutuhkan pengangkut untuk mengirim barangnya melalui ekspediteur.

Apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasinya, maka dinyatakan telah wanprestasi, artinya “tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan”. Hal ini berarti bahwa wanprestasi terjadi karena tidak

³³ Hermawan Lumba. 2014. *Jurnal Tentang Pertanggungjawaban Perusahaan Ekspediteur Kepada Konsumen Berdasarkan Uu No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Fakultas Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus Surabaya

dipenuhinya suatu perikatan. Perikatan menurut Pasal 1233 KUH Perdata, yang menentukan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian, baik karena Undang-undang. Dengan demikian, di samping perjanjian, Undang-undang juga dapat menimbulkan suatu perikatan. Mengenai hubungan antara perikatan dengan perjanjian, dijelaskan oleh Subekti sebagai berikut: “Hubungan antara perikatan dengan perjanjian adalah perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, di samping sumber-sumber lain”³⁴

Dengan demikian, seseorang yang wanprestasi memberikan hak kepada pihak lain yang dirugikannya untuk menggugat ganti kerugian. Mengenai bentuk ganti kerugian, Pasal 1243 KUH Perdata menentukan bahwa; Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.³⁵

Ini berarti bentuk ganti kerugian berupa penggantian biaya, rugi, dan bunga. Mengenai penggantian biaya, rugi, dan bunga dijelaskan oleh Subekti sebagai berikut: Biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak. Yang dimaksudkan dengan istilah rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang

³⁴ Prof R. Subekti, S.H., 1975. Pokok-Pokok Dari Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa. Cet. Xi. Hlm. 20

³⁵ Op,Cit. Hermawan Lumba. 2014. *Jurnal Tentang Pertanggungjawaban Perusahaan Ekspeditur Kepada Konsumen Berdasarkan Uu No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Fakultas Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus Surabaya

diakibatkan oleh kelalaian si debitur. Yang dimaksudkan dengan bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan, yang sudah dibayangkan atau sudah dihitung oleh kreditur.³⁶

Seorang yang dinyatakan wanprestasi dan digugat ganti kerugian mempunyai hak untuk mengelaknya dengan alasan sebagai berikut:³⁷

- 1) *Force Majeur/Over macht* (keadaan memaksa);
- 2) *Exemptio Non Adimpleti Contractus*;
- 3) *Rechtsverwerking* (pelepasan hak).

Force majeure dalam hukum perdata diatur dalam buku III KUHPerdara dalam Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdara. Pasal 1244 KUHPerdara menentukan: Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi, dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya. Sementara Pasal 1245 KUHPerdara menentukan: Tidaklah biaya rugi dan bunga, harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berutang berhalangan membe rikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.³⁸

³⁶ Ibid

³⁷ Ibid

³⁸ Riduan Syahrani, 2006. *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: P.T, Alumni, Hlm 243.

Untuk menentukan apakah debitur itu bersalah melakukan wanprestasi, maka perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana debitur dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi, menurut Subekti ada empat macam, yaitu:³⁹

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
- 3) Melaksanakan apa yang diperjanjikannya, tetapi tidak seperti bagaimana yang telah diperjanjikan.
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

Akibat hukum bagi debitur yang melakukan wanprestasi adalah hukuman atau sanksi sebagai berikut:⁴⁰

- 1) Debitur diharuskan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata).
- 2) Perjanjian timbal balik (bilateral) wanprestasi dari satu pihak memberikan hak kepada pihak yang lainnya untuk membatalkan atau memutuskan perjanjian lewat hakim (Pasal 1266 KUH Perdata).
- 3) Risiko beralih kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi (Pasal 1237 KUH Perdata). Ketentuan ini hanya berlaku bagi perikatan untuk memberikan sesuatu
- 4) Membayar biaya perkara apabila diperkarakan dimuka hakim (Pasal 181 ayat 1 HIR). Debitur yang terbukti melakukan wanprestasi tentu dikalahkan dalam perkara. Ketentuan ini berlaku untuk semua perikatan.

³⁹ Ilik Suseno. 2010. *Skripsi Tentang Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan Barang Antara Pt. Aqua Tirta Investama Klaten Dengan Cv. Bintang Jaya*. Fakultas Hukum Univesitas Sebelas Maret Surakarta

⁴⁰ Ibid

- 5) Memenuhi perjanjian bila masih dapat dilakukan, atau pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KUH Perdata). Ini berlaku untuk semua perikatan.

C. Tinjauan Umum Tentang Asuransi

1. Pengertian Umum Tentang Asuransi

Menurut Ketentuan Pasal 246 KUHD, Asuransi atau Pertanggungan adalah Perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya akibat dari suatu evenemen (peristiwa tidak pasti).

Asuransi merupakan salah satu buah dari peradaban manusia yang merupakan suatu hasil evaluasi kebutuhan manusia yang sangat hakiki ialah kebutuhan akan rasa aman dan terlindungi terhadap kemungkinan menderita kerugian.

Asuransi merupakan buah pemikiran dan akal budi manusia untuk mencapai suatu keadaan yang dapat memenuhi kebutuhannya, terutama untuk kebutuhan-kebutuhan yang hakiki sifatnya Antara lain rasa aman dan terlindungi.

Asuransi yang merupakan buah peradaban manusia, diciptakan guna mengatasi kesulitan manusia. Hal tersebut dimulai sebagai suatu gagasan untuk memperoleh proteksi terhadap rasa tidak aman karena ketidakpastian

yang selalu mengikutinya. Apabila kepastian sudah diperoleh maka manusia sudah merasa terlindungi artinya ia sudah mendapatkan apa yang ia butuhkan yaitu perlindungan.

Asuransi timbul bersamaan dengan lahirnya tingkat perkembangan social tertentu sesuai dengan kebutuhan manusia akan perlindungan atau pada tingkat perkembangan ekonomi tertentu yang sudah membutuhkan suatu kepastian tingkat keuntungan tertentu, sehingga membutuhkan pula adanya perlindungan tertentu bagi kelangsungan kegiatannya.

Berdasarkan definisi tersebut di atas maka asuransi merupakan suatu bentuk perjanjian dimana harus dipenuhi syarat sebagaimana dalam Pasal 1320 KUH Perdata, namun dengan karakteristik bahwa asuransi adalah persetujuan yang bersifat untung-untungan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1774 KUH Perdata. Menurut Pasal 1774 KUH Perdata, “Suatu persetujuan untung-untungan (*kansovereenkomst*) adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, bergantung kepada suatu kejadian yang belum tentu”.⁴¹

Adapun hal-hal penting mengenai asuransi yaitu:

- a. Merupakan suatu perjanjian yang harus memenuhi Pasal 1320 KUH Perdata; Perjanjian tersebut bersifat adhesif artinya isi perjanjian tersebut sudah ditentukan oleh Perusahaan Asuransi (kontrak standar). Namun demikian, hal ini tidak sejalan dengan ketentuan dalam Undang-undang

⁴¹ Deny Guntara. 2016. *Jurnal Ilmiah Tentang Asuransi Dan Ketentuan-Ketentuan Hukum Yang Mengaturnya*. Fakultas Ilmu Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang

No. 8 tahun 1999 tertanggal 20 April 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

- b. Terdapat 2 (dua) pihak di dalamnya yaitu Penanggung dan Tertanggung, namun dapat juga diperjanjikan bahwa Tertanggung berbeda pihak dengan yang akan menerima tanggungan;
- c. Adanya premi sebagai bukti bahwa Tertanggung setuju untuk diadakan perjanjian asuransi;
- d. Adanya perjanjian asuransi mengakibatkan kedua belah pihak terikat untuk melaksanakan kewajibannya.

2. Unsur-Unsur Asuransi

Berdasarkan Pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang maka dalam asuransi terkandung empat unsur yaitu :⁴²

- a. Pihak tertanggung (*insured*) yang berjanji untuk membayar uang premi kepada pihak penanggung, sekaligus atau secara berangsur-angsur.
- b. Pihak penanggung (*insurer*) yang berjanji akan membayar sejumlah uang (santunan) kepada pihak tertanggung, sekaligus atau secara berangsurangsur apabila terjadi sesuatu yang mengandung unsur tidak tentu.
- c. Suatu peristiwa (*accident*) yang tak tertentu (tidak diketahui sebelumnya).
- d. Kepentingan (*interest*) yang mungkin akan mengalami kerugian karena peristiwa yang tidak tentu.

⁴² Elsi Kartika Sari, S.H., M.H. & Advendi Simangunsong, S.H., M.M. 2005. Hukum Dalam Ekonomi. Jakarta: Grasindo. Hlm 86-87

Terjadi perkembangan penggolongan asuransi yang disebut dengan Asuransi Varia, asuransi yang mengandung unsur-unsur asuransi kerugian maupun asuransi jumlah, seperti asuransi kecelakaan dan asuransi kesehatan. Menurut sifat pelaksanaannya asuransi dapat digolongkan menjadi tiga yaitu sebagai berikut :⁴³

- (1) Asuransi sukarela, merupakan pertanggungan yang dilakukan dengan cara sukarela, yang semata-mata dilakukan atas suatu keadaan ketidakpastian atau kemungkinan terjadinya resiko kerugian atas suatu yang dipertanggungkan, misalnya asuransi kebakaran, asuransi kendaraan bermotor, asuransi pendidikan, asuransi kematian, dan sebagainya.
- (2) Asuransi wajib, merupakan asuransi yang bersifat wajib yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait, di mana pelaksanaannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah, misalnya jaminan social tenaga kerja (Jamsostek), asuransi kesehatan, dan sebagainya
- (3) Asuransi kredit, asuransi ini selalu berkaitan dengan dunia perbankan yang menitik beratkan pada asuransi jaminan kredit berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang sewaktu-waktu dapat tertimpa resiko yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pemilik barang maupun pemberi kredit khususnya bank yang meliputi : asuransi

⁴³ Ibid. Hlm 88-89

pengangkutan laut, asuransi kendaraan bermotor, dan sebagainya.

Adapun fungsi daripada asuransi kredit ialah :

- 1) Melindungi pemberi kredit dari kemungkinan tidak diperolehnya kembali kredit yang diberikan kepada para nasabahnya
- 2) Membantu kegiatan keamanan perkreditan baik kredit perbankan maupun kredit lainnya diluar perbankan

3. Jaminan Asuransi Pengiriman Barang

a. ACC-A/Klausula A

Mengganti kerugian barang yang memiliki kerusakan sebagian atau keseluruhan (total loss) dengan jangkauan jenis kerusakan yang paling luas.

b. ACC-B/ Klausula B

Mengganti kerugian barang yang memiliki kerusakan sebagian atau keseluruhan (total loss) dengan jangkauan jenis kerusakan yang terbatas dan kurang dari ACC-A

c. ACC-C/ Klausula C

Mengganti kerugian barang yang memiliki kerusakan sebagian atau keseluruhan (total loss) dengan jangkauan jenis kerusakan yang terbatas dan kurang dari ACC-B

4. Asuransi Pengangkutan Barang Melalui Darat

Asuransi Pengangkutan Barang yang diangkut lewat darat, asuransinya ditutup oleh perusahaan asuransi kerugian dengan menggunakan polis perjalanan darat. Dalam garis besarnya, isi polis

pengangkutan lewat darat (merujuk Pasal 256 dan 686 KUHDagang) adalah sebagai berikut : Nama, alamat tertanggung, dan pialang (apabila asuransi ditutup dengan perantaraan. Asuransi pengangkutan adalah produk asuransi yang bertujuan untuk memberikan proteksi terhadap barang yang diangkut baik melalui darat, laut maupun udara.

Asuransi pengangkutan diperuntukan bagi pemilik barang baik perseorangan, lembaga ataupun perusahaan, yang memerlukan perlindungan atas pengangkutan barang. Baik itu pengangkutan dengan menggunakan armada pribadi maupun yang menggunakan jasa perusahaan pengangkutan.

Asuransi dalam pengangkutan melalui darat merupakan sarana memberikan perlindungan atau jaminan untuk mengatasi ketidakpastian (uncertainly) yang mengandung resiko yang dapat mengancam pihak pengangkut barang ataupun konsumen. Resiko merupakan suatu keadaan yang mengandung kemungkinan terjadinya penyimpangan yang lebih buruk dari hasil yang diharapkan.⁴⁴

D. Tinjauan Umum Tentang Pengangkutan

1. Pengertian Pengangkutan

Kata “pengangkutan” berasal dari kata dasar “angkut” yang berarti mengangkut dan membawa. Dalam kamus hukum tercantum bahwa, pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan

⁴⁴ Junaedy Ganie, 2013, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta; Sinar Grafika, Hlm. 40.

pengangkutan baran dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengiim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.⁴⁵

Terdapat beberapa pendapat mengenai pengertian pengangkutan dari para sarjana, diantaranya:

a. Menurut Lestari Ningrum, pengangkutan adalah rangkaian kegiatan (peristiwa) pemindahan penumpang dan/atau barang dari satu tempat pemuatan (embargo) ketempat tujuan (disembarkasi) sebagai tempat penurunan penumpang atau pembongkaran baranf muatan. Rangkaian peristiwa pemindahan tersebut meliputi kegiatan: ⁴⁶

1) Dalam Arti Luas

- a) Memuat penumpang dan/atau barang kedalam alat pengangkut.
- b) Membawa penumpang dan/atau baran ketempat tujuan.
- c) Menurunkan penumpang atau membongkar barang di tempat tujuan.

2) Dalam Arti Sempit

Kegiatan membawa penumpang dan/atau barang dari stasiun/terminal/bandara/pelabuhan tempat pemberangkatan ke stasiun/terminal/bandara/pelabuhan tempat tujuan.

Menurut Ridwan Khairandy, dkk, yang dimaksud pengangkutan yaitu: “Pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat

⁴⁵ Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pt. Prestasi Pustaka, 2012, Hlm. 413

⁴⁶ Lestari Ningsrum, *Usaha Perjalanan Wisata Prespektif Hukum Bisnis*, Bandung; Pt. Citra Aditya Bakti, 2004, Hlm. 134

tujuan”. Dalam hal ini terkait unsur-unsur pengangkutan sebagai berikut:

- (1) Ada sesuatu yang diangkut;
- (2) Tersedianya kendaraan sebagai alat angkutan;
- (3) Ada tempat yang dapat dilalui alat angkutan.⁴⁷

Apabila ketiga unsur tersebut telah terpenuhi maka nantinya dalam proses pengangkutan atau pemindahan barang yang akan dikirim, akan terikat oleh berbagai macam peraturan dari Pemerintah. Berbagai macam peraturan tersebut diantaranya yakni dari Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Kumpulan Peraturan Menteri Perhubungan yang mnegatur mengenai perpindahan barang dari suatu tempat ketempat yang lain yang dilakukan oleh penyedia jasa angkutan barang.⁴⁸

2. Pengertian Pengangkutan Barang

Pengangkutan barang adalah kegiatan pemindahan benda yang tidak bergerak dengan selamat sampai pada tempat tujuan oleh suatu perusahaan pengangkutan dengan menggunakan alat transportasi. Hal yang sangat mendasar dalam pengangkutan yaitu perjanjian antara pengangkut dan pemilik barang sebelum menyelenggarakan pengangkutan. Menurut ketentuan Pasal 189 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu

⁴⁷ Ridwan Khairandy, Machsun Tabroni, Ery Arifuddin, Dan Djohari Santoso, 1999, *Pengantar Hukum Dagang Indonesia (Jilid 1)*, Yogyakarta: Gama Media, Hal. 195.

⁴⁸ Maulina Nur Hidayah. 2018. *Skripsi Tentang Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Pengiriman Barang Ditinjau Dari Hukum Perjanjian*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Lintas dan Angkutan Jalan, menyatakan “perusahaan angkutan umum wajib untuk mengasuransikan tanggung jawabnya”.⁴⁹

Pengangkutan barang merupakan rangkaian kegiatan (peristiwa) pemindahan barang atau penumpang dari satu tempat pemuatan ke tempat tujuan sebagai tempat penurunan pembongkaran barang muatan. Adapun peristiwa hukum pengangkutan meliputi tiga pokok kajian, yaitu meliputi:⁵⁰

- a. serangkaian perbuatan hukum mengenai cara terjadi perjanjian pengangkutan;
- b. saat terjadinya perjanjian pengangkutan;
- c. pembuktian dengan dokumen pengangkutan.

Peristiwa penyelenggaraan pengangkutan barang terjadi ka rena adanya perjanjian. Terjadinya perjanjian pengangkutan didahului oleh serangkaian perbuatan penawaran (*offer*) dan penerimaan (*acceptance*) yang dilakukan oleh pengangkut dan pengirim secara timbal balik. Serangkaian perbuatan tersebut dilakukan atas “persetujuan” bersama antara pengangkut dan pengirim.⁵¹

3. Jenis-jenis Pengangkutan dan Peraturannya

Dalam kemajuan teknologi serta bertambahnya jumlah penduduk dunia, hal ini disertai dengan peningkatan permintaan jasa angkutan oleh

⁴⁹ Op,Cit. Gusti Ayu Putu Damayanti. *Skripsi Tentang Peran Asuransi Kepada Perusahaan Pengangkutan Barang Melalui Darat Yang Mengalami Kerusakan Atau Kehilangan Barang*. Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

⁵⁰ Riza Rizki Fauzi. 2010. *Skripsi Tentang Tanggung Jawab Pengangkutan Kereta Api Dalam Penyelenggaraan Melalui Kereta Api Oleh Pt Bimaputra Express*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

⁵¹ Ibid

masyarakat harus diimbangi dengan sistem penyelenggaraan angkutan yang dapat memenuhi seluruh jenis kebutuhan masyarakat secara terpadu. Sebagai akibat berhasilnya pembangunan nasional, kebutuhan jasa angkutan tidak terbatas pada kebutuhan untuk memindahkan orang, barang dari suatu tempat ke tempat lain, melainkan kebutuhan angkutan barang maupun orang untuk menunjang bidang usaha lain.

Dalam pembahasan ini penulis akan menguraikan jenis-jenis pengangkutan yang dikenal pada umumnya, yaitu:⁵²

- (1) Pengangkutan Darat Pengangkutan darat dapat dilakukan dengan menggunakan kereta api an kendaraan umum, yang pengaturannya terdapat dalam: a. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), yakni dalam Buku I Bab V bagian 2 dan 3, mulai Pasal 90 sampai dengan Pasal 98. Dalam bagian tersebut diatur sekaligus pengangkutan darat dan perairan darat, namun hanya khusus mengenai pengangkutan barang b. Peraturan Perundang-Undangan, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (pengganti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian) dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).
- (2) Pengangkutan Laut Pengangkutan laut dapat dilakukan dengan menggunakan kapal, yang pengaturannya terdapat dalam:

⁵² Anna Rika Batubara. 2018. *Skripsi Tentang Pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan Pada Pt. Barumon (Medan)*. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

- a. KUHD, dalam Buku II Bab V tentang Perjanjian Charter Kapal, Buku II VA tentang Pengangkutan Barang, dan Buku II VB tentang Pengangkutan Orang.
- b. Pengaturan PerUndang-Undangan, yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (pengganti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran).

(3) Pengangkutan Udara Pengangkutan udara dapat dilakukan dengan menggunakan pesawat udara, yang pengaturannya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (pengganti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan).

4. Subyek dan Obyek hukum Pengangkutan

a. Subyek Hukum Pengangkutan

Subjek hukum pengangkutan dapat berstatus badan hukum, persekutuan bukan badan hukum, dan perseorangan. Subjek hukum pengangkutan adalah pendukung hak dan kewajiban dalam hubungan hukum pengangkutan, yaitu pihak-pihak dalam perjanjian pengangkutan, antara lain:⁵³

a) Pengangkut

Pengangkut adalah pihak yang mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau penumpang. Dapat berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik

⁵³ Op,Cit Lestari Ningrum. Hlm 140

Swasta (BUMS), ataupun perorangan yang berusaha dibidang jasa pengangkutan. Ciri-ciri karakteristik pengangkut antara lain:

- 1) Perusahaan penyelenggaraan angkutan.
- 2) Menggunakan alat pengangkut mekanik.
- 3) Penebit dokumen angkutan.

b) Pengirim (*Consigner, Shipper*)

Pengirim adalah pihak yang mengikatkan diri pada perjanjian pengangkutan untuk dapat membayar biaya angkutan atas barang yang diangkut. Pengirim yang tidak mengambil barangnya dari tempat penyimpanan yang ditetapkan dalam jangka waktu yang ditetapkan, dikenakan biaya penyimpanan barang. Apabila ada keterlambatan pemberangkatan oleh pengangkut, pengangkut wajib membayar ganti rugi sejumlah biaya angkut yang telah dibayar oleh pengirim. Ciri dan karakteristik pengirim, antara lain:

- (1) Pemilik barang yang berstatus pihak dalam perjanjian.
- (2) Membayar biaya angkutan.
- (3) Pemegang dokumen angkutan.

c) Penumpang (*Pessanger*) Penumpang adalah orang yang mengikatkan diri untuk membayar biaya angkutan atas dirinya yang diangkut atau semua orang/badan hukum pengguna jasa angkutan, baik darat, laut, maupun udara. Ciri dan karakteristik penumpang, antara lain: ⁵⁴

- (1) Orang yang berstatus pihak dalam perjanjian.

⁵⁴ Ibid

(2) Membayar biaya angkutan.

(3) Pemegang dokumen angkutan.

Pihak yang tidak berkedudukan langsung sebagai pihak dalam perjanjian tetapi bertindak atas nama atau untuk kepentingan pihak lain.⁵⁵

a) Ekspediteur:

Ekspediteur yaitu orang yang pekerjaannya mencari pengangkut barang di darat atau di perairan bagi pengirim. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 86 ayat I KUHD. Jadi ekspediteur berfungsi sebagai perantara.

b) Biro perjalanan (*travel agent*)

Biro perjalanan yaitu pihak yang mencari pengangkut untuk penumpang yang bertindak atas nama penumpang untuk memperoleh tiket.

c) Pengatur muatan

Pengatur muatan adalah orang yang menjalankan usaha di bidang muatan barang ke kapal dan pembongkaran barang dari kapal.

d) Penerima (*consigne*)

Penerima ini dapat dilakukan oleh pihak pengirim sendiri atau dapat pihak ketiga yang berkepentingan. Bila pihak penerima adalah pengirim sendiri maka penerima adalah pihak yang terlibat dalam perjanjian pengangkutan.

⁵⁵ Ilik Suseno. 2010. *Skripsi Tentang Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan Barang Antara Pt. Aqua Tirta Investama Klaten Dengan Cv. Bintang Jaya*. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

b. Obyek Hukum Pengangkutan

Obyek hukum pengangkutan adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mencapai tujuan hukum pengangkutan, yaitu:⁵⁶

- 1) Muatan barang Muatan barang yang dimaksud disini adalah barang-barang yang termasuk juga muatan hewan. Barang tersebut diangkut dari satu tempat ke tempat tujuan dengan menggunakan alat pengangkutan.
- 2) Muatan penumpang Muatan penumpang sama halnya dengan barang, tetapi perihal pelakunya tidak bisa disamakan dengan barang. Mengenai definisinya, undang-undang tidak memberikannya. Tetapi dilihat dari perjanjian pengangkutan selaku obyek perjanjian, penumpang adalah setiap orang yang berada dalam alat pengangkutan yang mempunyai tiket penumpang yang diangkut dari satu tempat ke tempat tujuan
- 3) Alat Pengangkutan Seorang pengusaha dalam usaha pengangkutan memiliki alat pengangkut sendiri. Alat angkut ini dapat berupa: a) kendaraan bermotor b) kapal laut niaga c) pesawat udara khususnya dalam pengangkutan dengan kendaraan bermotor harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah dicantumkan dalam undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu harus memenuhi: a) persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor b) pengujian kendaraan bermotor c) pendaftaran kendaraan bermotor

⁵⁶ Op.Cit. Ilik Suseno

- 4) Biaya pengangkutan Biaya pengangkutan tidak diatur secara umum dalam rumusan KUHD. Tetapi dilihat dari perjanjian pengangkutan, biaya pengangkutan adalah kontra prestasi terhadap penyelenggaraan pengangkutan yang dibayar pengirim atau penerima atau penumpang kepada pengangkut. Biaya pengangkutan yang ada terdiri dari dua unsur, yaitu pertama kontra prestasi atas penyelenggaraan pengangkutan, kedua biaya pemeliharaan terhadap apa yang diangkut.

c. Fungsi dan Tujuan Pengangkutan

1) Fungsi Pengangkutan

Fungsi pengangkutan ialah memindahkan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai.⁵⁷

2) Tujuan Pengangkutan

Pengangkutan diselenggarakan dengan tujuan untuk membantu memindahkan barang atau manusia dari satu tempat ke tempat lain secara efektif dan efisien. Dikatakan efektif karena perpindahan barang atau orang tersebut dapat dilakukan sekaligus atau dalam jumlah yang banyak sedangkan dikatakan efisien karena dengan menggunakan pengangkutan perpindahan itu menjadi relatif singkat atau cepat dalam ukuran jarak dan waktu tempuh dari tempat awal ke tempat tujuan.⁵⁸

⁵⁷ 4 H.M.N. Purwosutjipto, 2003. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Iii: Hukum Pengangkutan*, Jakarta: Djambatan, Hlm. 1.

⁵⁸ Louis Adi Putra, 2013. *Skripsi Tentang tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Pengangkutan Barang Melalui Pesawat Udara Negara*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

5. Perjanjian Pengangkutan

a. Pengertian Perjanjian Pengangkutan

Kegiatan dalam proses pengangkutan terdapat pihak-pihak yang saling mengikatkan diri yaitu pihak pengangkut dan pihak pengirim. Antara pihak pengangkut dan pihak pengirim terjadi suatu perjanjian yang mendasari pelaksanaan proses kegiatan pengangkutan yaitu perjanjian pengangkutan.

Definisi perjanjian terdapat di dalam Pasal 1313 KUHPdata, yang menyebutkan bahwa : "Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih".

Terjadinya pengangkutan disebabkan karena adanya perjanjian pengangkutan antara pengangkut dengan pengirim (pemakai jasa angkutan). Definisi mengenai perjanjian pengangkutan tidak terdapat dalam KUHD maupun peraturan-peraturan lainnya, sehingga untuk mengetahuinya yaitu dengan melihat dari beberapa para sarjana maupun doktrin.⁵⁹

Yang dimaksud Perjanjian Pengangkutan adalah perjanjian Antara pihak pengangkut dengan pengirim dan/atau penumpang yang isinya ialah, pengangkut berjanji menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau

⁵⁹ Beny Nurdiansyah. 2012. *Skripsi Tentang Tanggung Jawab Hukum Pengemudi Pengangkutan Barang Terhadap Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya Pada Pt. Pahala Express Delivery Di Purwokerto*. Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman Purwokerto

penumpang, sedangkan pengirim dan/atau penumpang berjanji membayar ongkos atau biaya pengangkutan.⁶⁰

Pada prinsipnya pengangkutan merupakan perjanjian timbal balik. Di mana pihak pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dari dan ke tempat tujuan tertentu, dan pengirim barang (pemberi order) membayar biaya/ongkos angkutan sebagaimana yang disetujui bersama.⁶¹

Asas-asas yang terkandung didalam perjanjian pengangkutan yaitu asas transparan, asas akuntabel, asas berkelanjutan, asas partisipatif, asas manfaat, asas efisien dan efektif, asas seimbang asas terpadu, dan asas mandiri. Perjanjian pengangkutan yang dibuat secara sah mengikat kedua belah pihak, yaitu pihak pengangkut dan pengirim. Antara kedua belah pihak tersebut tercipta hubungan kewajiban dan hak yang perlu direalisasikan melalui proses penyelenggaraan pengangkutan.⁶²

Penggunaan terhadap jasa pengangkutan barang akan mengakibatkan terjadi kesepakatan antara perusahaan angkutan barang dan pengguna jasa angkutan. Kesepakatan itu berujud lisan ataupun tulisan. Kesepakatan yang dilakukan para pihak, dalam hal ini berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, telah melahirkan suatu perjanjian yang mengikat para pihak. "Menurut sistem hukum yang masih berlaku di Indonesia,

⁶⁰ Prof. Dr. Rahayu Hartini, S.H., M.Si., M.Hum. 2012. *Hukum Pengangkutan Di Indonesia. Malang*. Citra Mentari. Hlm 11

⁶¹ Beny Nurdiansyah. Op,Cit

⁶² Teuku Rizkyradhian. 2012. *Jurnal Tentang Tinjauan Hukum Perjanjian Pengangkutan Darat Pupuk Urea Bersubsidi*. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

untuk mengadakan perjanjian pengangkutan barang atau orang tidak disyaratkan harus secara tertulis, jadi cukup diwujudkan dengan persetujuan kehendak secara lisan saja”.⁶³

b. Asas-Asas Perjanjian Pengangkutan

Menurut Abdulkadir Muhammad, terdapat asas-asas yang mendasari perjanjian pengangkutan antara lain :⁶⁴

1) Asas konsensual

Asas ini mensyaratkan adanya perjanjian pengangkutan secara tertulis, sudah cukup apabila ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak. Perjanjian pengangkutan dibuat secara tidak tertulis (lisan) namun didukung oleh surat angkutan. Surat angkutan tersebut bukanlah perjanjian tertulis melainkan hanya sebagai bukti bahwa persetujuan antara pihak-pihak itu ada.

2) Asas koordinasi

Asas ini mensyaratkan kedudukan yang sejajar antara pihak-pihak dalam perjanjian pengangkutan. Dalam hal ini, perjanjian keseluruhan tidak berlaku dalam perjanjian pengangkutan. Pihak pengangkut baik dalam pengangkutan darat, laut dan udara bukan merupakan buruh pihak pengirim.

⁶³ R. Soekardono, 1986. *Hukum Dagang Indonesia*, Rajawali, Jakarta, Hlm. 16.

⁶⁴ Parlin Gultom. 2016. *Tesis Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Pemilik Barang Atas Rusak Dan Musnahnya Barang Pada Moda Pengangkutan Darat Dihubungkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Magister Ilmu Hukum Universitas Pasundan

3) Asas campuran

Perjanjian pengangkut merupakan campuran dari tiga jenis perjanjian yaitu pemberian kuasa dari pengirim kepada pengangkut, penyimpanan barang, dan melakukan pekerjaan pengangkutan yang diberikan oleh pengirim kepada pengangkut

4) Asas tidak ada hak retensi

Penggunaan hak retensi dalam perjanjian pengangkutan tidak dibenarkan. Penggunaan hak retensi bertentangan dengan fungsi dan tujuan pengangkutan. Penggunaan hak retensi akan menyulitkan pengangkutan sendiri misalnya penyediaan tempat penyimpanan, biaya penyimpanan, penjagaan, dan perawatan barang.

E. Tinjauan Umum Tentang Ekspedisi/Jasa Pengangkutan Barang

Jasa Pengurusan Transportasi (freight forwarding) atau ekspedisi adalah usaha yang ditujukan untuk mewakili kepentingan pemilik barang untuk mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang.⁶⁵

Perusahaan Jasa Pengiriman Barang (Perusahaan Ekspediteur) merupakan salah satu bentuk perantaraan yang sering digunakan oleh masyarakat dalam kegiatan pemenuhan kebutuhan terutama dalam proses

⁶⁵ Tpmcargo. *Jasa Pengurusan Transportasi*.

<http://kirimbarangcargojakarta.blogspot.com/2016/02/definisi-pengertian-ekspedisi.html> Diakses 26 Oktober 2018

pengiriman barang.⁶⁶ Dapat dikatakan jasa ekspedisi yaitu memberikan jasa pengiriman dan juga mendistribusikan barang atau paket pada yang berhak menerimanya.

Perusahaan Jasa Pengiriman merupakan sebuah perusahaan yang bergerak pada bidang layanan pengiriman, yang dalam hal ini adalah pengiriman barang. pengiriman barang adalah proses memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lainnya.⁶⁷

F. Tinjauan Umum Tentang Klausula Eksorenasi

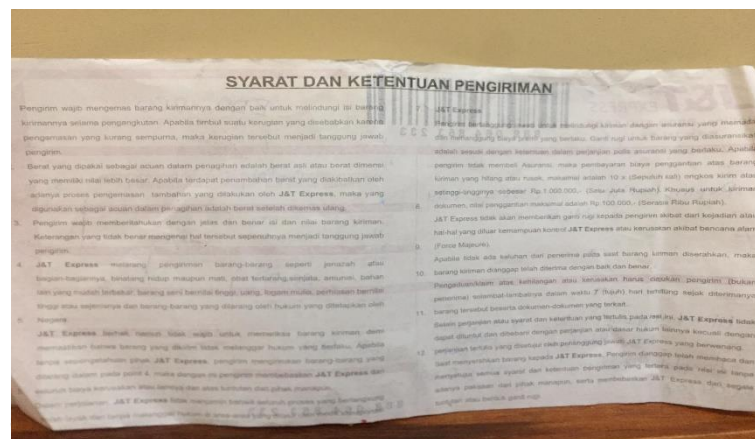
Sebagai alasan memberikan kemudahan dan keefisienan waktu terhadap sistem layanan permintaan pengiriman barang yang melibatkan banyak pihak, maka J&T Express sebagai pihak pertama merumuskan isi perjanjian dengan bentuk tertulis yang dimana memuat perjanjian baku dalam bentuk tertulis sering memuat klausula eksorenasi, yaitu klausula yang bertujuan untuk membebaskan atau membatasi tanggung jawab (pengalihan tanggung jawab) salah satu pihak terhadap gugatan pihak lainnya dalam hal yang bersangkutan tidak semestinya melaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian tersebut yang dimana isi atau syarat-syarat perjanjian perjanjian telah ditentukan secara sepihak oleh pelaku usaha. Praktik ini di satu sisi sangat menguntungkan bagi pelaku usaha, namun di sisi lain menimbulkan kerugian bagi konsumen.

⁶⁶ Hermawan Lumba. 2014. *Jurnal Hukum Tentang Pertanggungjawaban Perusahaan Ekspeditur Kepada Konsumen Berdasarkan Uu No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Fakultas Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus Surabaya

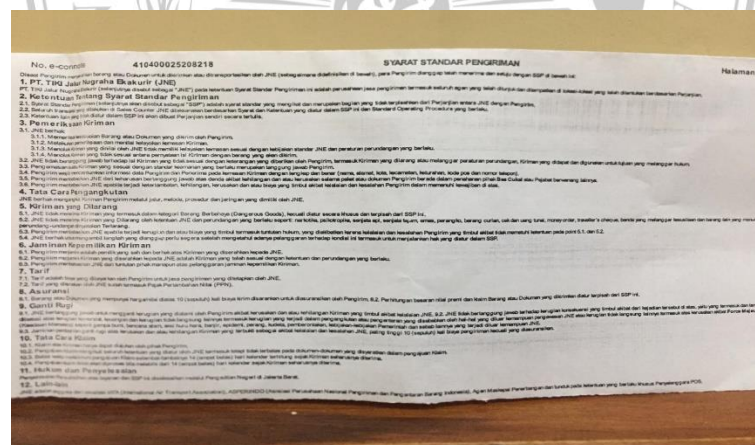
⁶⁷ PT. Rapi Trans Indonesia. *Mengenal Sedikit Mengenai Jasa Pengiriman Barang*. <https://rapi.co.id/mengenal-sedikit-mengenai-perusahaan-jasa-pengiriman-barang/> Diakses 26 Oktober 2018

Jika dilihat dari segi isinya terdapat ketidakseimbangan hak dan kewajiban para pihak yang artinya pihak pengusaha atau disebut dengan J&T Express cenderung melindungi kepentingannya dengan menetapkan sejumlah hak sekaligus membatasi hak-hak konsumennya.

Gambar 1: Resi J&T Express



Gambar 2: Resi JNE



Dari ketentuan diatas terdapat klausula eksonerasi di setiap ketentuan dan syarat yang dicantumkan oleh J&T dan JNE selaku jasa ekspedisi yang dimana klausula ini membatasi tanggung jawab salah satu pihak untuk mendapatkan keuntungan dan di sisi lain dapat merugikan pihak konsumen sebagai pengirim barang. yaitu sebagai berikut:

1) J&T Express

Tercantum didalam resi J&T pada angka 7 dan angka 12 yang menyebutkan bahwa “apabila pengirim tidak membeli Asuransi maka pembayaran biaya penggantian atas barang kiriman yang hilang atau rusak maksimal adalah 10x biaya ongkos kirim atau setinggi-setingginya sebesar Rp.1.000.000,-. Khusus untuk kiriman dokumen nilai penggantian maksimal adalah Rp. 100.000,-. Dan pada angka 12 menyebutkan bahwa “saat menyerahkan barang kepada J&T Express pengirim dianggap telah membaca dan menyetujui semua syarat dan ketentuan pengiriman yang tertera pada resi initanpa adanya paksaan dari pihak manapun, serta membebaskan J&T Express dari segala tuntutan atau bentuk ganti rugi”.

2) JNE

Didalam SSP (Syarat Standart Pengiriman) JNE angka 9 point 9.3 menyebutkan bahwa “Jaminan pemberian ganti rugi atas kerusakan dan atau kehilangan kiriman yang terbukti sebagai akibat kelalaian dan kesalahan JNE, paling tinggi 10 kali biaya pengiriman kecuali barang diasuransikan”.

G. Hak-Hak Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang LLAJ

Didalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah dijelaskan secara rinci mengenai hak-hak yang seharusnya diterima oleh konsumen. Undang-undang menetapkan bahwa pengangkut bertanggung jawab terhadap segala kerugian yang timbul

akibat kesalahan/kelalaian pengangkut seperti yang tertuang di dalam Pasal 193 Angka (1) (2) (3) (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang berbunyi :

- (1) Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengirim barang karena barang musnah, hilang, atau rusak akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali terbukti bahwa musnah, hilang, atau rusaknya barang disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau kesalahan pengirim.
- (2) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan kerugian yang nyata-nyata dialami.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak barang diangkut sampai barang diserahkan di tempat tujuan yang disepakati.
- (4) Perusahaan Angkutan Umum tidak bertanggung jawab jika kerugian disebabkan oleh pencantuman keterangan yang tidak sesuai dengan surat muatan angkutan barang.

Jadi, didalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan tidak menjelaskan mengenai hak-hak konsumen tetapi hanya menjelaskan mengenai tanggung jawab yang diberikan oleh perusahaan pengangkutan kepada konsumen/pengirim barang.